



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 545 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI**

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Provinsi.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 545 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

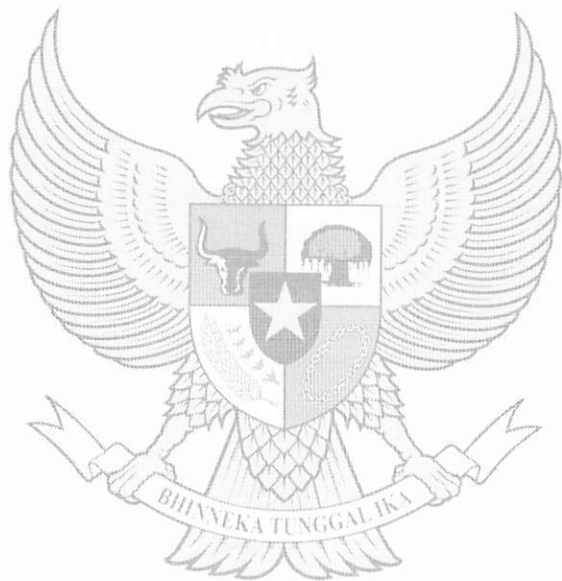
NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	123	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	29	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	44	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN	41	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
6.	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
7.	AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
8.	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	22	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
9.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	114	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
10.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	32	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
11.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	235	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
12.	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	17	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
13.	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	14	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
14.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	10	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
15.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	7	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
16.	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	32	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
17.	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	28	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
18.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	13	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
19.	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
20.	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	28	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
21.	AHLI PERTAMA - GURU KULINER	6	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
22.	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	44	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
23.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	121	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
24.	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	8	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
25.	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	54	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
26.	AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	15	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
27.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	105	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
28.	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	9	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
29.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	63	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
30.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	43	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
31.	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	126	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
32.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	75	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
33.	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	43	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
34.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	9	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
35.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	81	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
36.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	11	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
37.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
38.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	7	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

9

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
39.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	66	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
40.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
41.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	292	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
42.	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TOTAL		2000	

J



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 545 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

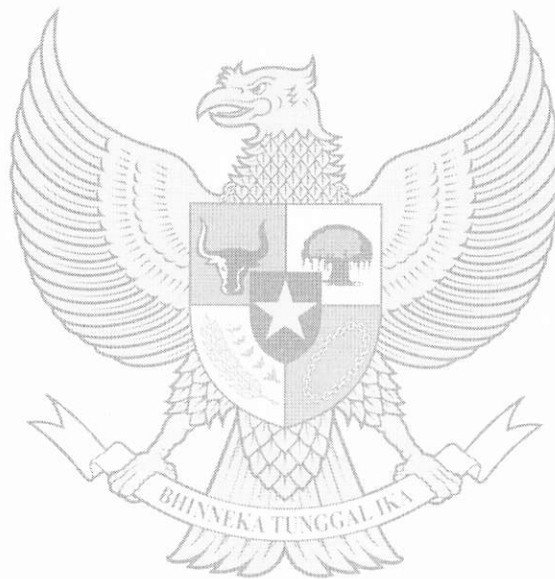
NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	26725	RS JIWA MEDAN
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
3.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESILOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
4.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESILOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	44517	RS KHUSUS MATA
5.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESILOGI DAN TERAPI INTENSIF	2	26751	RSU HAJI MEDAN
6.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESILOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	26725	RS JIWA MEDAN
7.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	26725	RS JIWA MEDAN
8.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	52631	RS. KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA
9.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
10.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	2	26751	RSU HAJI MEDAN
11.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
12.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
13.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	26725	RS JIWA MEDAN
14.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	3	44517	RS KHUSUS MATA
15.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
16.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	26751	RSU HAJI MEDAN
17.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	26725	RS JIWA MEDAN
18.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	52631	RS. KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA
19.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	26725	RS JIWA MEDAN
20.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
21.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
22.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2	44517	RS KHUSUS MATA
23.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	26725	RS JIWA MEDAN
24.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	52631	RS. KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA
25.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
26.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	52631	RS. KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA
27.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
28.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	26725	RS JIWA MEDAN
29.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS MATA-GLAUKOMA	1	44517	RS KHUSUS MATA
30.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS MATA-INFEKSI DAN IMUNOLOGI	1	44517	RS KHUSUS MATA
31.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS MATA-KATARAK DAN BEDAH REFRAKSI	1	44517	RS KHUSUS MATA
32.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS MATA-NEUROOFTALMOLOGI	1	44517	RS KHUSUS MATA
33.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS MATA-PEDIATRIK OFTALMOLOGI DAN STRABISMUS	1	44517	RS KHUSUS MATA
34.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS MATA-REFRAKSI DAN OPTIMASI VISUAL	1	44517	RS KHUSUS MATA
35.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS MATA-VITREO RETINA	1	44517	RS KHUSUS MATA
36.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	26725	RS JIWA MEDAN
37.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	23	82	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
38.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	44517	RS KHUSUS MATA
39.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	26751	RSU HAJI MEDAN
40.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	3481	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
41.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	6	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
42.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	44517	RS KHUSUS MATA
43.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
44.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	3481	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
45.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	52631	RS. KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA
46.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
47.	AHLI PERTAMA - DOKTER	20	26751	RSU HAJI MEDAN
48.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	44517	RS KHUSUS MATA
49.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
50.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	6	82	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
51.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
52.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
53.	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1	3481	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
54.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	26725	RS JIWA MEDAN
55.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
56.	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
57.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
58.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	3481	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
59.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	4	82	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
60.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	7	26751	RSU HAJI MEDAN
61.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
62.	TERAMPIL - BIDAN	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
63.	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
64.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
65.	TERAMPIL - PERAWAT	77	26751	RSU HAJI MEDAN
66.	TERAMPIL - PERAWAT	2	26725	RS JIWA MEDAN
67.	TERAMPIL - PERAWAT	3	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
68.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	52631	RS. KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA
69.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
70.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	44517	RS KHUSUS MATA
71.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	10	26751	RSU HAJI MEDAN
72.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	3481	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
73.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	52631	RS. KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA
74.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
75.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
76.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
77.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	3481	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
78.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	26647	RS KUSTA LAU SIMOMO
TOTAL		250		



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 545 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	S-1 PARIWISATA;S-1 KEWIRAUUSAHAAN	1	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BIRO HUKUM
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	BIRO ORGANISASI
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN	1	BIRO ORGANISASI
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	1	BIRO ORGANISASI
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	S-1 ILMU SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 MANAJEMEN;S-1 PENDIDIKAN	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	S-1 ILMU SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 PENDIDIKAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU HUKUM	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 EKONOMI ISLAM;S-1 EKONOMI SYARIAH;S-1 HUKUM INTERNASIONAL	1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM	1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN TERTIB NIAGA.
10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU KEARSIPAN	1	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
11.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	4	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
12.	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SEJARAH	2	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
13.	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI	2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
14.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TARUTUNG , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
15.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD GUNUNG SITOLI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
16.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD RANTAU PRAPAT , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
17.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PERENCANAAN
18.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA
19.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TANJUNG BALAI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
20.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD BINJAI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
21.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD SIDIKALANG , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
22.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD MEDAN , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
23.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD KOTANOPAN , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
24.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD SIBOLGA , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
25.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PEMATANG SIANTAR , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
26.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD DOLOK SANGGUL , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
27.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TEBING TINGGI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
28.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD KABANJAHE , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
29.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PADANG SIDIMPUAN , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
30.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD BINJAI , SEKSI BINA MARGA
31.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD GUNUNG SITOLI , SEKSI BINA MARGA
32.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PEMATANG SIANTAR , SEKSI BINA MARGA
33.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TEBING TINGGI , SEKSI BINA MARGA
34.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD KABANJAHE , SEKSI BINA MARGA
35.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD DOLOK SANGGUL , SEKSI BINA MARGA
36.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD SIBOLGA , SEKSI BINA MARGA
37.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TARUTUNG , SEKSI BINA MARGA
38.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD KOTANOPAN , SEKSI BINA MARGA
39.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PADANG SIDIMPUAN , SEKSI BINA MARGA
40.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TANJUNG BALAI , SEKSI BINA MARGA
41.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA KONSTRUKSI
42.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD SIDIKALANG , SEKSI BINA MARGA
43.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA
44.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD MEDAN , SEKSI BINA MARGA
45.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD RANTAU PRAPAT , SEKSI BINA MARGA
46.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD GUNUNG TUA , SEKSI BINA MARGA
47.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	2	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
48.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 ILMU PETERNAKAN	4	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
49.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 ILMU PETERNAKAN	3	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
50.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
51.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI	2	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAPROVSU
52.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD GUNUNG SITOLI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
53.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TARUTUNG , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
54.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TEBING TINGGI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
55.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PEMATANG SIANTAR , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
56.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PADANG SIDIMPUNAN , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
57.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD MEDAN , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
58.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PERENCANAAN
59.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD SIDIKALANG , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
60.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD KABANJAHE , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
61.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD DOLOK SANGGUL , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
62.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD SIBOLGA , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
63.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK PENGAIRAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG SUMBER DAYA AIR
64.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD KOTANOPAN , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
65.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD TANJUNG BALAI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
66.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD GUNUNG TUA , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
67.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD BINJAI , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
68.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD RANTAU PRAPAT , SEKSI SUMBER DAYA AIR DAN CIPTA KARYA
69.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN;S-1 BIOLOGI	40	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN , UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
70.	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	S-1 TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
71.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 AKUNTANSI	2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. , BIDANG PERINDUSTRIAN.
72.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 AKUNTANSI	1	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
73.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 AKUNTANSI	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
74.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
75.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
76.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
77.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
78.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
79.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
80.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ILMU KEARSIPAN;D-III KEARSIPAN	3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
81.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN;D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TOTAL			136	

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI